

## ABSTRAK

Profesi Notaris ialah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu, bersifat terus menerus mendahulukan pelayanan daripada imbalan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan berkelompok dalam suatu organisasi. Sehingga diharapkan untuk dapat berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga kode etik notaris khususnya di dalam bidang pengiklanan atau promosi diri. Notaris di angkat dan diberhentikan oleh negara maka dari itu profesi notaris diharapkan dapat mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan juga negara, dan juga profesi notaris merupakan profesi yang terhormat dan juga profesi kepercayaan. Maka dari itu kurang etis apabila seorang notaris melakukan publikasi atau promosi diri dengan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi seorang Notaris yang melanggar kode etik Notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri di Pangkalan Bun. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akibat hukum notaris yang melanggar kode etik Notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri di Pangkalan Bun. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif analitik. Permasalahan dianalisis dengan teori kewenangan, teori kemanfaatan dan teori penegakan hukum. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan berupa: 1) Notaris bilamana melakukan promosi dan atau publikasi diri, masyarakat yang mengetahui hal tersebut melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian MPD secara administratif mengklarifikasi sesuai sistem operasional prosedur pengawasan, apabila terbukti melanggar maka konsekuensi terberat yang akan diterima Notaris adalah pemberhentian jabatan secara tidak hormat. 2) Pelaksanaan tugas pengawasan oleh MPD di Pangkalan Bun telah berjalan dengan baik, terkait pelaksanaan tugasnya telah dengan cermat melakukan pengawasan, seperti adanya laporan bulanan dan laporan pemeriksaan protokol notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya. Pemeriksaan dilakukan berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu dan memberikan pengawasan terhadap Notaris agar dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan kode etik dan UUJN yang berlaku.

**Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, publikasi atau Promosi Diri**

## ***ABSTRACT***

Notary profession is a field of work that is based on education of expertise (skills, honesty, etc.), is continuous prioritizing services rather than rewards, has a high sense of responsibility, and is grouped in an organization. So it is expected to be able to behave in accordance with the Law of Notary Position and also the notary code of ethics especially in the field of advertising or self-promotion. Notary is adopted and dismissed by the state and therefore the notary profession is expected to give priority to community service and also the state, and also the notary profession is a respectable profession and also a profession of trust. Therefore it is not ethical if a notary public does a promotion or self-promotion in order to benefit himself. The purpose of this study is to: 1) To find out and analyze the legal consequences for a notary who violates the notary code of ethics in publicizing or promoting themselves at Pangkalan Bun. 2) To find out and analyze the implementation of the consequences of notary law that violates the Notarais code of ethics in publicizing or promoting themselves at Pangkalan Bun. The method of approach in this research is sociological juridical. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature studies, while the data analysis is done in descriptive analytic. The problem is analyzed with authority theory, expediency theory and law enforcement theory. The results of this study conclude in the form of: 1) Notary when carrying out promotion and / or self-publication, the public who know the matter reports to the Regional Supervisory Council (MPD), then MPD administratively clarifies according to the operational procedure monitoring system, if proven to violate the heaviest consequences what the Notary will receive is a dishonorable discharge. 2) The implementation of supervisory duties by MPD in Pangkalan Bun has been going well, related to the implementation of their duties have been carefully conducting supervision, such as monthly reports and notarial protocol inspection reports on the deeds he made. The examination is carried out periodically once a year or every time that is deemed necessary and provides oversight of the Notary Public in order to carry out his position in accordance with the applicable code of ethics and UUJN.

Keywords: **Notary, Code of Ethics, publication or Self Promotion**